



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 6979-6995

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan di Kampung Rutum, Raja Ampat

Meyta Longkutoy^{1✉}, Andrei Maryen², Ester Mirino³

Manajemen, Universitas Kristen Papua

Email: mirinoester031299@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Masalah dana desa sering kali disebabkan oleh kurangnya kesadaran dari aparat desa, keterlambatan distribusi dana desa, penggunaan dana desa tanpa justifikasi yang memadai, penggunaan dana desa untuk tujuan lain di luar peruntukannya, kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan desa. teknik deskriptif yang digunakan dalam penelitian kualitatif. Data primer digunakan dalam penelitian ini. Penelitian lapangan adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data. Bekerja dengan data, menyusunnya, dan mengelompokkannya ke dalam bagian-bagian yang dapat dikelola adalah langkah-langkah dalam proses analisis data kualitatif. Efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Rutum termasuk dalam kategori cukup berhasil, berdasarkan studi tentang efisiensi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa. Temuan dari wawancara masyarakat tentang administrasi dana desa di Desa Rutum sedikit berbeda dengan temuan data. Menurut temuan wawancara masyarakat, pengelolaan dana desa belum berhasil. Pengelolaan dana desa di Desa Rutum menurut data statistik cukup berhasil.

Kata Kunci: *Efektifitas, Pembangunan, Dana Desa*

Abstract

Problems with village funds are often caused by a lack of awareness from village officials, delays in the distribution of village funds, the use of village funds without adequate justification, the use of village funds for purposes other than their allocation, lack of transparency, lack of supervision, and lack of community involvement in the village development process. descriptive techniques used in qualitative research. Primary data was used in this research. Field research was the method used to obtain the data. Working with data, organizing it, and grouping it into manageable parts are steps in the qualitative data analysis process. The effectiveness of village fund management in Rutum Village falls into the moderately successful category, based on a study of the efficiency of village fund management in improving village development. Findings from community interviews about the administration of village funds in Rutum Village are slightly different from the data findings. According to the community interview findings, the management of village funds has not been successful. According to the statistical data, the management of village funds in Rutum Village has been moderately successful.

Keyword: *Effectiveness, Development, Village Fund*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia saat ini sedang berupaya untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka menjaga keseimbangan antara tingkat pembangunan daerah dan pedesaan. Rencana pemerintah untuk memerangi kesenjangan pembangunan adalah dengan melaksanakan pembangunan nasional dengan fokus pada pembangunan desa. Pemberian otonomi seluas-luasnya kepada desa berarti memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya energi seefisien mungkin untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan desa dan kota demi kepentingan bangsa, (Majjon Kinaro, 2019)

Pemerintah Indonesia saat ini sedang mempercepat pertumbuhan nasional melalui koordinasi laju pembangunan daerah, yang mencakup faktor fisik dan non-fisik. Karena pembangunan daerah melibatkan upaya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat melalui pelaksanaan pembangunan yang merata dan karena hasil-hasilnya didistribusikan secara langsung untuk kepentingan mayoritas warga yang tinggal di daerah pedesaan, maka pembangunan daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kualitas pembangunan nasional. Dampak positif terhadap pembangunan nasional dapat dicapai dengan menyeimbangkan pembangunan jangka panjang secara adil dengan kepentingan masyarakat pedesaan (Jivanca Mamujaja, Freddy Kawatu, Anita Kambey, 2021).

UU No. 32 tahun 2004 memberikan daerah otonomi seluas-luasnya, sehingga daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri semua urusan pemerintahannya tanpa bergantung

pada pemerintah pusat, mengembangkan kebijakan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan memberdayakan masyarakat, serta melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Otonomi didefinisikan sebagai hak untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri sesuai dengan kewenangan yang diberikan dan karakteristik daerah. Hak ini harus dilaksanakan dengan cara yang sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian otonomi, yaitu untuk memajukan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya (Abidin, 2015)

Tanggung jawab pemerintah pusat untuk mendistribusikan dana ke setiap desa untuk program-program pembangunan tertentu dikenal sebagai "dana desa". Setiap tahun, Dewan Perwakilan Rakyat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk keuangan desa, yang dialokasikan untuk setiap desa. Dana desa tidak diragukan lagi memiliki satu tujuan penting yang ingin dicapai, yaitu inisiatif untuk mendorong kebebasan masyarakat desa dalam melaksanakan pembangunan daerah mereka sendiri (Halimantus, Ika, Zaiful, 2022)

Merupakan salah satu kampung yang ada di Kabupaten Raja Ampat, setiap kampung dipilih untuk mendapatkan bantuan dana atau anggaran dari pemerintah, bantuan dana atau anggaran ini diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung serta peningkatan pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan memajukan perekonomian kampung (Zainal, Bagus, 2018). Kontribusi desa terhadap Desa Rutum masih belum dimanfaatkan dengan baik. Salah satunya adalah pembangunan yang masih sulit dikelola karena dana yang dikeluarkan pemerintah untuk desa belum dialokasikan secara adil atau belum mencapai sasaran. Bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan keterlibatan warga dalam pembangunan jika keuangan desa benar-benar dialokasikan secara jujur dan tepat sasaran. Tentu saja, hal ini akan berujung pada kesejahteraan warga desa (Kodir Siregar, 2020)

Dana desa yang diberikan diharapkan dapat mengatasi masalah di masyarakat, meningkatkan fasilitas umum bagi penduduk, dan meningkatkan potensi yang ada di masyarakat, baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Masalah dengan dana desa sering kali dimulai dari terbatasnya realisasi oleh administrator desa, keterlambatan pencairan, dan pengeluaran yang tidak didukung oleh sumber daya yang dapat diandalkan. data, Penggunaan dana masyarakat untuk tujuan selain yang diprioritaskan, kurangnya transparansi, kurangnya pengawasan, dan minimnya keterlibatan masyarakat lokal dalam pembangunan desa merupakan masalah. Untuk mencegah timbulnya masalah baru pada tahun anggaran mendatang, kasus-kasus yang ada saat ini harus segera diselesaikan.

Hal ini memerlukan kerja sama untuk memastikan bahwa dana yang telah disalurkan berjalan seefisien mungkin, dan pihak berwenang meminta masyarakat desa untuk ikut serta dalam pembangunan. Untuk mengelola setiap kegiatan pembangunan desa, yang melibatkan cukup banyak uang, harus ada keuangan desa. Di Kampung Rutum, Kabupaten Raja Ampat, setiap kampung mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya dengan jumlah tertentu dengan tujuan untuk memajukan setiap masyarakat. Dalam situasi seperti ini, penggunaan uang masyarakat terkadang rentan terhadap pencurian dana oleh pihak-pihak yang seharusnya bisa diandalkan oleh warga untuk membangun desa agar terus maju dan berkembang. Peran pemerintah kabupaten sebagai penyandang dana untuk memastikan sumber dana desa meningkat tidak bisa dilepaskan dari makna posisi kita sebagai warga negara dalam situasi ini. Dengan adanya dana desa, maka ada pula periode baru dalam mengelola pemerintahan desa, dan diharapkan mampu mengelola sesuai dengan peraturan secara efektif dan efisien. Selain itu, uang tunai dari masyarakat dapat digunakan sebagai modal untuk mendanai semua inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan akses desa terhadap energi.

Tidak adanya pertemuan antara kepala desa dan masyarakat untuk membahas anggaran dana desa dan tidak adanya statistik dana desa merupakan tantangan yang muncul. Dan isu-isu yang sering muncul di masyarakat antara lain adalah kegagalan pembangunan rumah untuk penduduk Rutum, jalan setapak, tugu untuk menandai batas marga, dan pembagian kapal laut dan perahu Viber yang hanya diperuntukkan bagi individu atau keluarga tertentu. Masyarakat lain di lingkungan tersebut menganggap hal ini tidak adil.

METODE PENELITIAN

Teknik penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif (*Qualitative Methods*) dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala atau masalah yang ada sekarang, khususnya gejala-gejala yang berlangsung pada saat penelitian ini dilakukan. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengumpulkan data di luar laboratorium. Fokus penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan desa.

Data primer digunakan dalam penelitian ini. Informasi primer adalah data yang telah diamati dan dicatat sejak awal dan berasal langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, data dikumpulkan mengenai bagaimana keuangan daerah dikelola untuk memajukan pembangunan di desa Rutum. Peneliti di lapangan mengumpulkan data primer dengan

melakukan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan temuan mereka. Para partisipan dalam pengelolaan dana desa di Desa Rutum menjadi sumber informasi (informan) dalam penelitian ini, dimulai dari kepala desa dan sekretaris desa (Ki Hajar dan Surakarta)

Menurut Spradley, frasa "populasi" tidak digunakan dalam penelitian kualitatif, tetapi lebih tepat disebut sebagai "situasi sosial" atau lingkungan sosial, yang terdiri atas tiga komponen: tempat, pelaku, dan aktivitas yang bekerja sama dengan baik. Latar sosial ini dapat diciptakan di rumah dengan keluarga dan kegiatan mereka, atau dapat diciptakan oleh individu yang bercakap-cakap di sudut jalan, di kota, atau di kota metropolitan. Lingkungan sosial ini dapat digambarkan sebagai item studi yang membuat penasaran (Sugiyono, 2012) Jadi yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Perangkat Desa dan Masyarakat Kampung Rutum. Sampel adalah bagian dari populasi yang ciri-cirinya akan diperiksa. Sampel yang baik adalah sampel yang representatif atau dapat mencirikan ciri-ciri populasi, yang darinya dapat ditarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan Sampel tidak disebut sebagai responden dalam penelitian kualitatif, melainkan sebagai narasumber, informan, partisipan, teman, dan guru. Karena tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk mengembangkan teori, sampel yang digunakan di dalamnya juga tidak disebut sebagai statistik melainkan sebagai sampel teoritis. Dua puluh informan penelitian akan digunakan dalam penelitian ini, dengan mempertimbangkan keterbatasan waktu dan kesempatan peneliti.

Penelitian lapangan (Field Research) adalah metode (Bernardus dan Yonathan, 2017) yang digunakan untuk memperoleh data, dan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data:

- 1) Wawancara; Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah dialog terpimpin yang didahului dengan serangkaian pertanyaan terbuka, menurut Gunawan (2014:160) Wawancara penelitian dapat dilakukan secara santai atau formal dan lebih dari sekadar pembicaraan biasa. Wawancara penelitian dirancang untuk mengumpulkan data hanya dari satu sisi, sehingga menghasilkan hubungan yang tidak seimbang. Agar dapat fokus pada pengumpulan informasi yang diperlukan untuk membahas topik penelitian, pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian ini adalah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.
- 2) Observasi, Dalam penelitian kualitatif, wawancara adalah dialog terpimpin yang didahului dengan serangkaian pertanyaan terbuka, menurut Gunawan (2014:160). Wawancara penelitian dapat dilakukan secara santai atau formal dan lebih dari sekadar pembicaraan biasa. Wawancara penelitian dirancang untuk mengumpulkan data hanya dari satu sisi, sehingga menghasilkan hubungan yang tidak seimbang. Agar dapat fokus

pada pengumpulan informasi yang diperlukan untuk membahas topik penelitian, pertanyaan yang digunakan dalam wawancara untuk penelitian ini adalah pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya.

- 3) Dokumentasi, Sugiyono (2007:82) mendefinisikan dokumen sebagai catatan peristiwa yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Pelengkap dari penggunaan metodologi observasi dan wawancara adalah penggunaan studi dokumen. Hasil penelitian yang didukung oleh dokumentasi lebih dapat diandalkan.

Mengolah data, mengaturnya menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan mengidentifikasi pola mengenai apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan menentukan apa yang dapat dikomunikasikan kepada orang lain adalah langkah-langkah dalam analisis data kualitatif. Karena data untuk penelitian kualitatif ini dikumpulkan dari berbagai sumber, tidak ada pola yang jelas dalam pendekatan analisis data yang digunakan. Oleh karena itu, analisis data dapat dilihat sebagai proses investigasi dan sintesis yang metodis.

Dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif, temuan penelitian penulis digunakan untuk menyampaikan informasi. Pendekatan analisis kualitatif yang berbasis ilmiah didefinisikan oleh logika (penalaran yang benar dan logis), eksperimen (teknik penelitian yang didasarkan pada pengamatan berdasarkan pengalaman dan indera manusia), dan sistem (teratur). Setelah mengumpulkan semua data yang relevan, sesi analisis harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua data diambil dari temuan studi dari sumber yang berbeda, seperti: (Jimea, 2022) Agar hasil observasi, wawancara, dan dokumen mudah dibaca dan dipahami, data-data tersebut disajikan dalam bentuk teks konvensional. Pencarian dilanjutkan hingga sesi tertentu, ketika operasi analisis informasi - yaitu reduksi informasi, penyajian informasi, dan verifikasi kesimpulan - dilakukan:

- 1) Upaya peneliti untuk membatasi jumlah data dikenal sebagai reduksi data. Hal ini melibatkan proses merangkum, memilih informasi yang paling penting, memusatkan perhatian pada informasi tersebut, dan mencari tema dan polanya. Para peneliti akan merasa lebih mudah untuk mengumpulkan lebih banyak data sebagai hasil dari data yang telah direduksi.
- 2) Pada tahap ini, peneliti menyampaikan data yang telah diringkas ke dalam bentuk ringkasan singkat, atau penyajian data (data display). Teks naratif adalah metode penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.
- 3) Penarikan kesimpulan dari tema-tema data dikenal sebagai verifikasi kesimpulan. Langkah ini melibatkan analisis peneliti terhadap tema-tema dari proses pengumpulan

data yang telah selesai. Ketiga langkah di atas menunjukkan bagaimana metode analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui proses pengklasifikasian penyajian data dalam bentuk uraian ringkas dan kemudian membuat kesimpulan atas data yang telah diperoleh

HASIL DAN PEMBAHASAN

Daftar informan dan pengkodean berikut ini terkait dengan metode penelitian-wawancara-yang digunakan dalam penelitian ini dan dimaksudkan untuk membantu pembahasan temuan-temuan penelitian. Secara keseluruhan, saya mengumpulkan informasi dari tiga informan-satu kepala desa, satu sekretaris desa, dan satu bendahara desa-serta masyarakat setempat untuk penelitian saya mengenai efektivitas pengelolaan keuangan desa dalam mendorong pertumbuhan di Desa Rutum. "Dana Desa" atau APBN, pemerintah pusat, mendistribusikan uang ke setiap dusun. Sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah, Dana Desa digunakan. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2014), Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan. Akuntabilitas dan keterbukaan biasanya digunakan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Rutum, berdasarkan temuan wawancara studi ini. Sebelum semua orang dapat menyepakati tujuan tersebut, pemerintah desa harus melalui berbagai langkah untuk memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk memberdayakan lingkungan. Semua anggota masyarakat berpartisipasi dalam diskusi untuk mengumpulkan gagasan tentang kebutuhan warga desa, dan prioritas alokasi kemudian dipilih berdasarkan hasil wawancara dengan informan.

Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa adalah proses pengalokasian dana yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang diterima oleh Kabupaten atau Kota. Pengelolaan dana desa merupakan perwujudan dari hak desa untuk menjalankan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang sejalan dengan pertumbuhan desa itu sendiri, yang didasarkan pada keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan peran pemerintah desa dalam memberikan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memacu percepatan pembangunan dan pertumbuhan kawasan strategis. Penatausahaan keuangan desa menjadi sangat penting dalam sistem pembangunan daerah untuk membiayai pembangunan daerah yang belum berkembang.

Efisiensi pengelolaan keuangan desa dalam memacu pertumbuhan di Desa Rutum menjadi pertimbangan penting dalam melaksanakan pembangunan di lokasi yang belum berkembang. Oleh karena itu, pemberian dana desa merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan desa. Pertumbuhan desa membantu meningkatkan dan mewujudkan status dan derajat kehidupan masyarakat. Tujuan utama dari pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kualitas hidup secara umum di lingkungan tersebut. Model pembangunan desa juga sangat menekankan pada pemerataan pembangunan, stabilitas keamanan regional yang kuat dan dinamis, manfaat bersama, dan pertumbuhan ekonomi yang besar. Dalam kerangka pembangunan nasional, pemerintah desa berfungsi sebagai perpanjangan tangan negara untuk menjamin kesejahteraan masyarakat terdistribusi secara adil dan menjadi sarana untuk mencapai tujuan-tujuan administratif.

Berikut ini terdapat beberapa hasil wawancara bersama dengan Kepala Kampung Rutum yaitu Bapak Thomas Mirino, bapak Pilemon Fakdawer sebagai Sekretaris kampung beserta Bapak Yohanes Mirino sebagai Bendahara Kampung, yaitu Pembangunan apa saja yang menjadi prioritas dari penggunaan dana desa?

Nara Sumber 1 (Kepala Kampung) ; *prioritas penggunaan dana desa untuk program pembangunan sesuai kewenangan desa meliputi; *) Perbaikan dan konsolidasi data desa dan pendataan perkembangan deesa melalui indek desa membangun(IDM); *) Pencegahan dan penurunan stunting di desa akan di fokuskan pada pemberdayaan masyarakat desa dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat diprioritaskan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat seperti ; perahu viber dan mesin tempel 15 PK*

Nara sumber 2 (Bendahara Kampung) ; *yang menjadi prioritas dari penggunaan dana desa adalah kesejahteraan masyarakat seperti apa kebutuhan mereka itu yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa, Adapun beberapa yang menjadi prioritas tambahan dari penggunaan Dana Desa adalah kesejahteraan masyarakat seperti apa kebutuhan masyarakat itu yang menjadi prioritas utama dalam penggunaan dana desa terdapat beberapa program yang direncanakan oleh Kepala Kampung yaitu pembangunan rumah renovasi rumah,jalan dan biaya pendidikan akan tetapi belum dimusyawarakan dengan masyarakat dikarenakan dapat terhitung dengan jumlah anggran yang diterima apakah bisa memenuhi atau tidak sehingga program ini dapat disesuaikan dengan jumlah anggaran yang di terima*

Program pembangunan apa saja yang sudah dilakukan?

Nara Sumber 1 (Kepala Kampung) ; *Ketahanan pangan dan pencegahan penurunan stunting dan bidang pemberdayaan masyarakat yaitu perahu viber dan mesin tempel 15 pk*

Nara Sumber 2 (Bendahara) ; *Dan yang saat ini sudah diprogramkan oleh kepala kampung sebagai kepala dalam penggunaan dana desa adalah perahu viber dan mesin tempel 15 pk kedua program ini sudah berjalan dari tahun 2019 sampai saat ini*

Bagaimana respon warga mengenai pemberdayaan melalui program dana desa?

Nara Sumber 1 (Kep.Kampung), Nara Sumber 2 (Bendahara) ; *menurut respon masyarakat cukup baik,sesuai dengan kesepakatan bersama yaitu aturan satu tahun anggaran karena itu sampai saat ini masyarakat dengan kami berharap program ini menjadi program utama dalam penggunaan dana desa,*

Kendala apa saja yang dihadapi dalam melakukan pembangunan desa?

Nara Sumber 3 (Sekretaris) ; *setiap kampung memiliki banyak kendala / masalah mulai dari tingkat kemiskinan yang tinggi kesehatan dan pendidikan yang rendah SDM yang rendah sarana prasarana yang sulit*

Namun, untuk memastikan bahwa pembangunan desa terjadi secara seimbang, pelaksanaan pembangunan nasional adalah solusi bagi kita. Melaksanakan pembangunan nasional dengan memperhatikan pembangunan desa merupakan rencana pemerintah untuk memerangi ketimpangan pembangunan. Hingga saat ini, tidak sedikit tantangan yang harus kita lalui untuk melaksanakan pembangunan di desa secara ideal demi menyeimbangkan pembangunan antara desa dan kota demi kemajuan negara.

Solusi apa yang dilakukan untuk mengatasi kendala kendala tersebut?

Nara Sumber 3 (Sekretaris) ; *adapun solusi yang dapt dilakkukan untuk mengatasi kendala atau masalah tersebut adalah melakukan muskam dengan masyarakat secara menyeluruh yaitu menyampaikan Aspirasi program ini dengan pikiran tenang dan mampu berpikir positif untuk menyelesaikan masalah yang ada agar mendapatakn tujuan yang sudah disepakati bersama, sehingga usulan dari masyarakat juga dapat sesuai atau sejalan dengan apa yang diprioritaskan dari pemerintah. Sosialisasi merupakan proses penyampaian kepada kelompok sasaran yang bertujuan untuk membantu kelompok sasaran untuk lebih memahami mengenai suatu hal yang akan diterapkan di masyarakat.*

Apakah ada sosialisasi yg di lakukan oleh pemerintah kampung kepada masyarakat terkait dana desa?

Narasumber 4 (Masyarakat) (41) : *Pemerintah kampung memberikan sosialisasi kepda masyarakat kampung melalui program dana desa. Penggunaan dana desa di prioritaskan*

untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang di tujuikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dlm rencana kerja pemerintah desa.

Narasumber 5 (Masyarakat) (40) : *Maka kami masyarakat kampung mengambil keputusan agar dana desa dialokasikan untuk membeli kebutuhan masyarakat kampung. 1) Seperti motor tempel; 2) Perahu Viber; 3) Dan menjamin anak sekolah; 4) Pembangunan rumah dan renovasi rumah; 5) Pembangunan jalan. Dan berupa barang" lainnya seperti bahan bangunan kepada masyarakat kampung. Sehingga semuanya terlaksana dengan hasil keputusan masyarakat kampung kepada pemerintah kampung Rutum.*

Bagaimana prinsip yg dilakukan aparat pemerintah kampung dalam pelaksanaan kegiatan di kampung Rutum?

Narasumber 6 (Masyarakat) (52) : *ada 5 prinsip yg digunakan aparat pemerintah kampung Rutum dlm pelaksanaan dan pengelolaan dana desa adalah sebagai berikut: 1) Keadilan, dgn mengutamakan hak atau kepentingan seluruh warga desatempa membeda-bedakan; 2) Kebutuhan prioritas, dengan mendahulukan kepentingan desa yang lebih mendesak dan lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dgn kepentingan sebagian besar masyarakat desa; 3) Seluruh kegiatan yg didasari oleh dana desa dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat; 4) Seluruh kegiatan yg bersumber dri dana desa harus dapat di pertanggungjawabkan secara administrasi, teknik, dan hukum; 5) Dana desa dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.*

Menurut bpk/ibu, apakah pengelolaan ADD dalam bidang pembangunan sudah transparan dan apa saja penghambat pengalokasian Dana Desa ?

Narasumber 7 (Masyarakat) (35) : *Pengelolaan keuangan yg transparan akan memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang penggunaan anggaran pemerintah desa salah satunya terkait dengan pengelolaan ADD. Salah satu permasalahan yg muncul yaitu kepala kampung dianggap tidak transparan dikarenakan masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan pengelolaan ADD. Sehingga masyarakat melakukan protes terhadap kepala kampung, agar selalu transparan kepada lembaga dan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala kampung dalam pengelolaan ADD tidak transparan. Hal tersebut dilakukan kepala kampung tidak terbuka kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan ADD.*

Narasumber 8 (Masyarakat) (50) : *Dampak penghambat merupakan bagian dari proses ekonomi yg berlangsung secara terus menerus dlm kehidupan masyarakat, dan kita melihat dlm meningkatkan pembangunan kampung hanya bergantung pada program pemerintah*

kampung, karena yg menjadi penghambat adalah program, dan mengapa seperti begitu dikarenakan dana desa tdk begitu pencairan satu kali tetapi bertahap sehingga sedikitnya ada penghambat. Bukan penghambat jadi program tidak dijalankan, program tetap dijalankan sesuai tahapan dana desa Akhirnya pembangunan kampung tetap berjalan terus. Meningkatkan pembangunan adalah salah satu proses yang harus di perjuangkan untuk merubah kehidupan masyarakat merujuk dalam pembangunan kampung.

Narasumber 9 (Masyarakat) (51) : *KKN penyalahgunaan kewenangan atau tidak ada keterbukaan terhadap tiga tahap pelaksanaan program pembangunan, yaitu : 1) Perencanaan program pembangunan; 2) Pelaksanaan program pembangunan; 3) Evaluasi pelaksanaan program pembangunan*

Bagaimana pemerintah kampung Rutum dalam mewujudkan prinsip keterbukaan untuk mengelola dana yg bersumber dari alokasi dana desa?

Narasumber 10 (Masyarakat) (27) : *Menyangkut dengan pemerintah kampung Rutum untuk mewujudkan prinsip atau komitmen dalam pemerintah kampung dalam keterbukaan mengelola dana desa dan pasti dalam pembentukan wadah/musyawarah kampung bahwa dalam setiap pencairan karena sudah musyawarah kampung baru bisa dana dicairkan untuk pembentukan. program kampung, pengelolaan dana desa sesuai program atau kegiatan keuangan desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa sebagai bagian dari keuangan desa dan juga memiliki masalah dan faktor yang menjadi penghambat. Pada penjelasan kendala bahwa penggunaan dana desa tidak di jelaskan kepada masyarakat, kendala ini yg sering terjadi di kampung. Dan disini perekonomian itu sangat penting bagi masyarakat dan harus pemerintah kampung mengevaluasi kembali dalam keterbukaan dana desa dalam mewujudkan perubahan dalam kampung.*

Apakah bapak/ibu sudah merasakan manfaat pembangunan di kampung Rutum seperti jalan?

Narasumber 11 (38) : *Kami masyarakat kampung Rutum sangat berterimakasih atas bantuan yg kita terima selama ini seperti pembangunan jalan. Selama ini kami masyarakat sangat berterimakasih kepada pemerintah kampung yang sudah memperhatikan kami selama ini dalam pembangunan jalan.*

Apakah pemerintah desa terbuka kepada masyarakat dalam mengelola dana desa?

Narasumber 12 (50) : *manajemen Dana Desa (pengelolaan dana desa) MUSKAM (Musyawarah kampung) Pemerintah desa harus mengadakan muskam, motivasi dan dorongan kepada kami masyarakat agar dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan dalam mengelola dana desa.*

-PEMERINTAH DESA; Disitulah kami masyarakat dapat melihat langsung secara keterbukaan

pemerintah desa kepada kami masyarakat dalam mengelola dana desa tersebut. Pemerintah desa harus menjelaskan semua program” mengenai tujuandalam mengelola dana desa tersebut secara terperinci.

-MASYARAKAT DESA; Program dan tujuan mengenai dana desa kami masyarakat harus mengelola dana desa tersebut sesuai dgn penjelasan lewat muskam tersebut diatasdari pemerintah desa kepada kami masyarakat agar jangan mendapat hambatan dalam pengurusan program dalam kampung. Memberikan penjelasan yang menyeluruh mengenai dana desa tersebut agar masyarakat tau dan paham mengenai dana tersebut dengan baik.

Menurut bapak pembangunan apa yang harus dilakukan dan yang menjadi prioritas masyarakat desa?

Narasumber 13 (32) : 1) *Pembangunan rumah*; 2) *Program motor 15 PK dan perahu Viber*
Bagaimana tahapan perencanaan pengelolaan dana desa di kampung rutum?

Narasumber 10 (54) : *Tahapan pengelolaan keuangan Desa adalah kegiatan lanjutan yang disebut dengan perencanaan dalam pengelolaan keuangan. Yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausaha pelaporan, sampai pada pertanggungjawaban laporan realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa selama satu tahun. penerimaan dan pengeluaran pemerintah desa pada tahun anggaran berkenaan yang di anggarkan dalam APBDES maka itulah tahapan pertama dari proses pengelolaan keuangan desa.*

Apakah ada pembangunan yang telah direalisasikan dan sesuai dengan apa yang di rencanakan sebelumnya?

Narasumber 14 (52) : *Program rencana pembangunan perumahan tahun anggaran 2003 akan sudah ada di Kampung Rutum.*

Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di kampung rutum.?

Narasumber 15 (41) : *Itu berbentuk wadah kampung, dan didalam partisipasi masyarakat sudah semakin baik dalam pembangunan terkhusus pemerintah kampung Rutum, bahwa pembangunan ini sudah dibantu oleh pemerintah dalam bantu DDS dan ADD . Bantuan yang sudah diberikan oleh pemerintah kabupaten raja Ampat berbentuk (APBD) dan anggaran pembelanjaan, yaitu dana desa (DDS) dana ini sudah diprogram dari dari pusat pada instansi masing-masing dengan pelaksanaan pembangunan di kampung seperti bantuan proyek perumahan dan jembatan, dgn ini akhirnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di kampung Rutum semua itu berjalan dengan baik bagi masyarakat kampung Rutum.*

Narasumber 12 (52) : *Kalau menyangkut dgn tingkat partisipasi masyarakat itu, kecuali*

dana desa yang sering berbentuk (pertemuan) disitulah baru ada partisipasi bagi setiap RK Masing masing karena bantuan dana desa itu, yang sering membantu kami masyarakat kampung Rutum karena dalam perekonomian ini sudah membaik.

Apakah pengelolaan alokasi dana desa sudah efektif dalam meningkatkan pembangunan di kampung Rutum?

Narasumber 13 (52) : *Belum efektif dan belum menyentuh sasaran masyarakat kampung.*

Narasumber 10 (50) : *Belum efektif secara pembangunan dan ekonomi Masyarakat,*

Efektivitas Dana Desa

Ada beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan seberapa efektif penggunaan dana desa, antara lain (a) pencapaian tujuan; (b) ketepatan waktu; (c) proses pendistribusian; dan (d) penggunaan dana sesuai dengan waktu pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan; Masyarakat setempat mendapatkan informasi tentang dana desa melalui pemerintah desa. Kurangnya persiapan pegawai pemerintah desa, terutama dalam pengelolaan keuangan, yang hampir sama dengan pemerintah daerah, membuat keuangan desa saat ini kurang dihargai sebagai pendekatan baru bagi desa. Menurut Nugroho (2014), efektivitas pelaksanaan kebijakan publik ditentukan oleh ketersediaan sumber daya pendukung, terutama Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten.

Menurut John P. (2015), sumber daya yang tidak memadai menjadi salah satu penyebab pelaksanaan kebijakan yang tidak efisien dan keluar dari jalur, yang berujung pada pelaksanaan pembangunan yang tidak tepat. Efektivitas pada dasarnya adalah pengukuran sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diantisipasi dalam dokumen perencanaan pembangunan desa yang telah diputuskan sebelumnya. Karena tujuan utama manajemen adalah efektivitas, maka masuk akal jika pembuatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) akan berdampak pada keberlangsungan program pembangunan desa (Iskandar, 2016). Anwar Sanusi, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa PDTT, percaya bahwa dengan meningkatkan dana desa, desa-desa yang lebih sulit dapat dihilangkan. Desa-desa kerajinan tradisional diperlakukan sama layaknya, dan tidak ada desa yang akan mendapatkan keuntungan dari pendekatan yang berbeda. Dengan cara ini, desa dapat maju dan berkembang untuk kepentingan warganya. Para pemangku kepentingan harus berkomitmen bersama dan secara tegas untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di tingkat desa, terutama yang berkaitan dengan keuangan masyarakat.

Integritas dari kepala desa dan perangkat desa

Kualitas pertama yang dibutuhkan oleh para pemimpin dan aparat desa adalah integritas. Kepala desa dan perangkat desa akan melihat keuangan desa sebagai dana amanah yang harus dikelola seefektif mungkin untuk kepentingan masyarakat desa jika mereka memiliki integritas yang kuat. Dengan demikian, kepala desa dan perangkat desa tidak akan menyalahgunakan keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Bendahara desa, yang memegang peranan penting dalam mengawasi keuangan desa, tidak hanya harus memiliki kejujuran, tetapi juga harus memiliki nyali untuk "menolak" perintah atasan (kepala desa) jika diminta untuk keluar dari anggaran. Integritas memungkinkan kepala desa dan perangkat desa mendapatkan manfaat dari pengawasan independen mereka sendiri, yang secara terus menerus mendukung setiap orang untuk melaksanakan kewajibannya.

Tata kelola

Sistem pengelolaan keuangan yang sederhana namun efektif dan pengelolaan keuangan yang terbuka di tingkat desa diperlukan sebagai komponen kedua dari pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Sistem pengelolaan keuangan pemerintah untuk pengelolaan keuangan tingkat desa, Permendagri No. 113/2014, dapat diterapkan dalam hal sistem keuangan. Metode yang baru (Permendagri No. 37/2007) lebih sederhana daripada yang lama dan diharapkan lebih mudah diterapkan oleh kepala desa dan perangkat desa dengan berbagai keahlian.

Kapasitas SDM

Manajer yang kompeten diperlukan untuk pengelolaan keuangan desa yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, para pemimpin desa dan aparat desa harus mendapatkan pelatihan dan pendampingan, terutama untuk tim perwakilan kabupaten dan tim kabupaten. Sangat penting untuk menyadari bahwa menciptakan kapasitas adalah proses yang panjang. Kompromi harus dicapai jika ada hubungan antara kapasitas dan jumlah modal yang menjadi hak desa. Kabupaten yang memiliki kewenangan untuk mendistribusikan dana desa harus menerapkan prinsip kehati-hatian. Lebih baik jika jumlah yang disalurkan lebih kecil dari nilai yang menjadi hak desa jika kemampuan sumber daya manusia tidak mencukupi, dan kabupaten menjelaskan kepada masyarakat yang terkena dampak mengapa distribusi tidak dapat dilakukan. Desa memiliki hak untuk mengadu ke kabupaten jika mereka merasa hak-hak mereka tidak ditegakkan. Namun, pendekatan ini dianggap lebih aman karena mencegah potensi penggelapan dana, yang tentu saja membutuhkan banyak usaha untuk menanganinya.

Pengawasan warga

Pengawasan masyarakat merupakan salah satu katup pengaman untuk menghentikan pencurian. Oleh karena itu, daerah harus merencanakan inisiatif yang unik untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan jika masyarakat kurang memiliki kepedulian dan sikap kritis terhadap pengawasan penyelenggaraan APBD. Pemerintah kabupaten harus secara proaktif mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan alokasi dana desa yang dianggarkan oleh pusat dapat dilaksanakan demi tercapainya pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di tingkat desa. Hasil harus jelas dan ringkas. Hasilnya harus meringkas temuan (ilmiah) daripada memberikan data secara rinci. Harap soroti perbedaan antara hasil atau temuan Anda dan publikasi sebelumnya oleh peneliti lain. Diskusi harus mengeksplorasi pentingnya hasil penelitian, bukan mengulangnya. Bagian Hasil dan Diskusi gabungan sering kali cocok. Hindarikutipan dan diskusi ekstensif tentang literatur yang diterbitkan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas , maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Dalam mempraktikkan pengelolaan dana desa adalah perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.. pada peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah digital. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pemberdayaan masyarakat dan pembangunan (Presiden Republik Indonesia, 2014). Namun, hal ini masih belum ideal, terutama dalam hal akuntabilitas pelaporan kinerja dan kurangnya media sebagai sarana untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah desa dalam mengelola sumber daya yang ada di desa serta rendahnya pengetahuan masyarakat. Dengan menggunakan dana desa, masyarakat desa dapa.
2. Kurangnya keterbukaan terhadap masyarakat dalam mengelola keuangan desa di desa-desa pengrajin yang sedang berkembang membuat pemerintah desa tidak dapat mempraktikkan ide transparansi dalam mengelola uang desa. Masyarakat masih menghadapi beberapa tantangan di lokasi pedesaan ketika mencoba untuk mendapatkan informasi tentang pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, M. Z, 'Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa', *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, (2015) h 13
- Anggoro, Bayu, Fikri Hamidy, and Ade Dwi Putra. "Sistem Informasi Akuntansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Isorejo Kec. Bunga Mayang Kab. Lampung Utara)." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi Akuntansi 2*, no. 2 (2022): 54–61.
- Arifin, Zainal, and Bagoes Soenarjanto. "Efektivitas Penggunaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa Sokobanah Daya Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang" (2018): 1–7.
- Bungin, Burhan. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Dewantara, Ki Hadjar, and Surakarta E-mail. "Qualitative Description as One Method in Performing Arts Study," no. 19 (n.d.): 173–179.
- Gunawan, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bumi Aksara, Surabaya.
- Handoko, T. Hani. 2012. *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta. BPFE
- Hurriyaturrohma, H., Indupurnahayu, I., & Septianingsih, P. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Desa Cibitung Wetan). *Neraca Keuangan: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 16(1), 12-18
- Hulu, Yamulia, R Hamdani Harahap, and Muhammad Arif Nasutian. "Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa." *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial* 10, no. 1 (2018): 146.
- Jurnal, Jimea, Ilmiah Mea, Fitriani Sandra Dewi, Sari Andayani, Universitas Pembangunan Nasional Veteran, and Jawa Timur. "PEMBANGUNAN DI DESA KLURAK KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2019 JIMEA | Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen , Ekonomi , Dan Akuntansi)" 6, no. 1 (2022): 259–274.
- Kinaro, Maijon. "BESAR Disusun Oleh : MAIJON KINARO FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2019 M / 1441 H" (2019).
- Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Masyarakat di Desa Magmagan Karya Kecamatan Lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA0*, 7(1)
- Mamuaja, Jovanca, Freddy Kawatu, and Anita Kambey. *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. Jurnal Akuntansi Manado*. Vol. 2, 2021. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/36731%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/download/36731/34154>.

- Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, (Yogyakarta: Andi, 2009), h.124
- Novianti Ruru, Lintje Kalangi, Novi S. Budiarmo. "ANALISIS PENERAPAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DALAM UPAYA MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA" 12, no. 1 (2017): 83–90.
- PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/PMK.07.2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA," n.d.
- Rahayu, Depi. "Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Kalikayen Kabupaten Semarang." *Economics Development Analysis Journal* 6, no. 2 (2018): 107–116.
- Sakdiyah, Halimatus, Ika Lis Mariatun, and Zaiful Arief. "Efektivitas Penggunaa Dana Desa (DD) Dalam Meningkatkan Pembangunan Di Desa Bilaporah Tahun 2021"." *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha* 14, no. 1 (2022): 190–193.
- Seran, Bernardus, and Yonathan Mael. "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani Di Desa Usapinonot" 2, no. 2502 (2017): 59–62.
- Siregar, Kodir. "Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat." *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja* 11, no. 1 (2020): 51–62.
- Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Bandung: Alfabeta CV, 2012), hal. 216
- Sujarweni, V. Wiratna. 2016. Pengantar Akuntansi. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Student, M Tech, Rahul Richa Kumar, R Eviewers C Omments, Ajit Prajapati, Track- A Blockchain, A I MI, Prof Santosh N Randive, et al. "EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DESA MENURUT PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DESA SIJABUT TERATAI KECAMATAN AIR BATU KABUPATEN ASAHAN." *Frontiers in Neuroscience* 14, no. 1 (2021): 1–13.
- Wicaksono, Galih, Yeni Puspita, Sandhika Cipta Bidhari, Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, Venantya Asmandani, Fakultas Ilmu, Ilmu Politik, and Universitas Jember. "DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DI KABUPATEN" 4, no. 1 (2019): 9–20.
- "PERATURAN MENTERI KEUANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 222/PMK.07.2020 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA," n.d.